

Ketika Pertumbuhan Ekonomi Tidak Cukup: Pembangunan Manusia dan Dinamika Kemiskinan di Indonesia

Hafid Sumarwadji¹, Dirmansyah Darwin², La Ode Muhammad Iksan Yusuf³, Muhammad Yamin⁴, Ahmad Fadhil Imran⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar, Indonesia

E-mail: hafid.sumarwadji@unm.ac.id¹, dirmansyah.darwin@unm.ac.id², iksan.yusuf@unm.ac.id³, muhammad.yamin@unm.ac.id⁴, ahmadfadhil@unm.ac.id⁵

Article History:

Received: 30 Maret 2026

Revised: 07 April 2026

Accepted: 09 April 2026

Keywords: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Pembangunan Regional

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali relevansi pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan menekankan peran pembangunan manusia. Penelitian menggunakan data penampang lintang tingkat provinsi tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara efektif. Sebaliknya, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memiliki peran langsung dalam menurunkan kemiskinan antarprovinsi. Secara simultan, pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,43, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 43 persen variasi tingkat kemiskinan di Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan lebih efektif dicapai melalui penguatan pembangunan manusia dibandingkan mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan ketimpangan regional guna mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang kompleks dan bersifat multidimensi, karena tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak (Shen & Li, 2022). Perbaikan kinerja ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti oleh

penurunan kemiskinan yang merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis bersifat pro-poor, terutama ketika hasil pembangunan terkonsentrasi pada wilayah tertentu maupun kelompok masyarakat tertentu (Mu'minah & Tjenreng, 2025; Pratiwi *et al.*, 2022). Ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan tersebut mempertegas bahwa pertumbuhan ekonomi agregat saja belum cukup efektif dalam mengatasi kemiskinan structural (Soleman, 2022).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin nasional menurun menjadi 8,57 persen pada September 2024. Meskipun demikian, secara spasial masih terdapat kesenjangan kemiskinan yang cukup tajam antarprovinsi di Indonesia (Frisnoiry *et al.*, 2024). Perbedaan ini terlihat antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, di mana provinsi-provinsi di kawasan timur secara konsisten mencatat tingkat kemiskinan yang lebih tinggi (Huda *et al.*, 2023). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur ekonomi, serta kesempatan kerja produktif, yang pada akhirnya memperkuat karakter kemiskinan yang bersifat struktural dan persisten (Dudek *et al.*, 2023; Badan Pusat Statistik, 2025).

Variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia juga menunjukkan disparitas yang cukup lebar. Rata-rata tingkat kemiskinan provinsi tercatat sebesar 9,17 persen, dengan tingkat kemiskinan terendah sebesar 3,80 persen di Provinsi Bali dan tertinggi mencapai 21,09 persen di Provinsi Papua Barat. Nilai simpangan baku sebesar 4,48 persen mengindikasikan bahwa penyebaran tingkat kemiskinan antarwilayah masih relatif tinggi. Secara statistik, meskipun sebagian besar provinsi berada pada kategori kemiskinan menengah ke bawah, sekelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya rata-rata nasional. Temuan ini menegaskan bahwa penurunan kemiskinan nasional belum sepenuhnya diiringi oleh pengurangan ketimpangan kesejahteraan regional (BPS Indonesia, 2025).

Berbagai penelitian empiris dalam satu dekade terakhir menunjukkan kualitas pembangunan manusia memiliki peran yang lebih konsisten dan signifikan dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi agregat (Salsabila *et al.*, 2024). Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas akses terhadap pekerjaan yang lebih layak, serta memperkuat ketahanan rumah tangga miskin dalam menghadapi tekanan ekonomi (Yudi Pardita *et al.*, 2024). Eki Arianto & Hendry Cahyono, (2025) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, sementara pengaruh pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang bervariasi antarwilayah. Temuan ini diperkuat oleh Venosia *et al.*, (2025) yang menegaskan bahwa tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi memperlebar ketimpangan dan memperlambat proses penurunan kemiskinan.

Berdasarkan fakta empiris tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk meninjau kembali relevansi pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai pendekatan analisis utama. Dengan menggunakan data kemiskinan provinsi periode 2015-2024, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kontekstual serta menjadi dasar perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan ekonomi secara tradisional dipandang sebagai instrumen utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja. Teori *trickle-down effect* menyatakan bahwa peningkatan output nasional pada akhirnya akan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin (Hagen, 1957). Namun,

berbagai studi empiris menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak selalu bersifat linear dan otomatis. Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sering kali hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sehingga gagal menurunkan kemiskinan secara signifikan (Ravallion, 2001). Di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi relatif stabil, disparitas kemiskinan antarwilayah masih tinggi, khususnya antara Kawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia, yang menandakan keterbatasan pendekatan berbasis pertumbuhan semata (Ifa, 2025; Jati *et al.*, 2023).

Dalam konteks tersebut, pendekatan pembangunan manusia (*human development approach*) semakin mendapat perhatian sebagai strategi alternatif yang lebih komprehensif dalam pengentasan kemiskinan. Konsep ini menekankan peningkatan kualitas manusia melalui akses pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak sebagai fondasi utama kesejahteraan (United Nations Development Programme, 2024). Sejumlah penelitian menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang lebih konsisten dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan dibandingkan pertumbuhan ekonomi agregat (Yudi Pardita *et al.*, 2024). Temuan ini diperkuat oleh studi panel data lintas provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu menekan kemiskinan secara berkelanjutan, terutama di wilayah tertinggal (Pratamasyari *et al.*, 2025; Rahman & Primandhana, 2025).

Lebih lanjut, menyoroti pentingnya dimensi spasial dan struktural dalam analisis kemiskinan seperti wilayah Indonesia bagian timur secara umum menghadapi keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses terhadap pasar tenaga kerja produktif, yang menyebabkan kemiskinan bersifat persisten dan struktural (Didu *et al.*, 2023; Soleman & Soleman, 2022). Data BPS (2025) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional terus menurun, kesenjangan antarprovinsi tetap menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, berbagai kajian merekomendasikan integrasi kebijakan pertumbuhan ekonomi dengan strategi pembangunan manusia dan pengurangan ketimpangan wilayah agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan berkelanjutan (Suhada *et al.*, 2025; Edison & Andriansyah, 2023; Syafitri *et al.*, 2025).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatori, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antarvariabel berdasarkan data numerik. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif melalui metode statistik dan ekonometrika (Creswell, 2014; Sugiyono, 2021).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data penampang lintang (*cross-section*) tahun 2024. Data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi: Persentase penduduk miskin provinsi sebagai variabel dependen, pertumbuhan ekonomi provinsi yang diproksi melalui pertumbuhan PDRB ADHK sebagai variabel independen pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen kedua.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, distribusi, dan perbedaan antarprovinsi. Selanjutnya, regresi data panel digunakan karena mampu mengakomodasi variasi

data lintas wilayah dan waktu secara simultan, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan regresi cross-section atau time series tunggal (Wooldridge, 2002). Model yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y : tingkat kemiskinan,
 α : konstanta
 β : koefisien
 X_1 : pertumbuhan ekonomi
 X_2 : IPM
 ε : error term.

Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan beberapa tahapan analisis statistik, yaitu:

1. Uji-t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan IPM) terhadap tingkat kemiskinan secara individual.
2. Uji-F (simultan) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan.
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa besar variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi pertumbuhan ekonomi dan IPM dalam model regresi.

Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5 persen ($\alpha = 0,05$). Interpretasi hasil analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori ekonomi pembangunan dan hasil penelitian terdahulu.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel disusun untuk memberikan kejelasan mengenai konsep, pengukuran, dan satuan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut definisi operasional variable.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan
Kemiskinan (Y)	Kemiskinan diukur sebagai persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada masing-masing provinsi dan periode penelitian.	Persen (%)
Pertumbuhan Ekonomi (X_1)	Pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).	Persen (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2)	Indeks komposit yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia, meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.	Indeks

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia masih memperlihatkan variasi yang relatif tinggi, yang tercermin dari nilai simpangan baku sebesar 4,48 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa disparitas kesejahteraan regional masih menjadi permasalahan yang signifikan. Secara spasial, provinsi-provinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia cenderung mendominasi kelompok wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, di antaranya Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Dudek *et al.*, (2023) dan Suhada *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa ketimpangan

pembangunan antarwilayah di Indonesia bersifat struktural, terutama dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur ekonomi, dan kesempatan kerja produktif. Dengan demikian, perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi jangka pendek, tetapi juga menunjukkan ketidakseimbangan pembangunan yang bersifat sistemik.

Tabel 2. Hasil analisis regresi linier berganda

Komponen Uji	Variabel / Indikator	Koefisien	t-Statistik	Sig	F-Statistik	Sig. (F)	R-Square
Uji-t (Parsial)	Konstanta	1479,447	7,993	0,000			0,43
	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	0,17	0,318	0,751			
	IPM (X2)	-0,106	-4,103	0,000			
Uji-F (Simultan)	Model Regresi				8,574	0,000	

Secara inferensial, hasil uji-t menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, yang tercermin dari nilai signifikansi sebesar 0,751. Sebaliknya, IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai signifikansi 0,000. Hasil uji-F menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, dengan nilai F-statistik 8,574 dan signifikansi 0,000.

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier berganda, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-square*) sebesar 0,43. Nilai ini menunjukkan bahwa 43 persen variasi tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia tahun 2024 dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan dalam model penelitian.

Sementara itu, 57 persen variasi tingkat kemiskinan lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran, struktur sektor ekonomi, kualitas infrastruktur, kebijakan sosial, serta karakteristik geografis dan institusional masing-masing provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan merupakan fenomena *multidimensional* yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Nilai *R-square* sebesar 0,43 dapat dikategorikan cukup kuat untuk penelitian sosial-ekonomi dengan data penampang lintang (*cross-section*), mengingat heterogenitas karakteristik antarprovinsi di Indonesia relatif tinggi. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian empiris sebelumnya yang menunjukkan bahwa model kemiskinan berbasis variabel makro umumnya menghasilkan nilai koefisien determinasi sedang, karena kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor struktural dan kontekstual (Si *et al.*, 2021; Sihombing *et al.*, 2023).

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan mengindikasikan proses pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara efektif yang ditunjukan melalui pengaruh signifikannya. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan wilayah dengan basis modal dan teknologi yang relatif kuat cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang terbatas, khususnya bagi penduduk miskin dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata (Elsani *et al.*, 2024; Rahman & Primandhana, 2025).

Kondisi ini sejalan dengan temuan Pratamasyari *et al.*, (2025) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa diiringi peningkatan kualitas pembangunan manusia berpotensi memperlebar ketimpangan dan melemahkan efektivitas penurunan kemiskinan. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pandangan (Dollar & Kraay, (2002) yang menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam pengentasan kemiskinan, dampaknya sangat bergantung pada struktur ekonomi serta mekanisme distribusi manfaat pertumbuhan, sehingga tanpa dukungan kebijakan redistributif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi cenderung menghasilkan dampak yang terbatas terhadap penurunan kemiskinan.

Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan mengindikasikan bahwa proses pertumbuhan yang terjadi belum sepenuhnya bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara efektif. Pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu dan wilayah dengan basis modal serta teknologi yang relatif maju cenderung memiliki daya serap tenaga kerja yang terbatas, khususnya bagi penduduk miskin dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata (Rahman & Primandhana, 2025). Selain itu, tidak signifikannya variabel pertumbuhan ekonomi yang mengindikasikan adanya peran ketimpangan sebagai faktor peredam (*moderating effect*) dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. (Costello *et al.*, 2015) menunjukkan bahwa pada tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi semakin rendah, sehingga dampak pertumbuhan terhadap penurunan kemiskinan cenderung melemah.

Sebaliknya, pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap kemiskinan menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan manusia dalam strategi pengentasan kemiskinan. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan peluang memperoleh pekerjaan layak. (Simamora *et al.*, (2025) dan (Wulansari *et al.*, 2025) membuktikan bahwa investasi pada pendidikan dan kesehatan memiliki dampak yang lebih konsisten dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan peningkatan pendapatan agregat semata. Hasil ini konsisten dengan berbagai studi empiris di Indonesia yang menemukan bahwa IPM merupakan determinan utama kemiskinan antarwilayah. Pardita *et al.*, (2024) dan Tondi & Boni, (2025) menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan mampu menurunkan tingkat kemiskinan, bahkan ketika pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini memperkuat argumen bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat utama agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara inklusif.

Selain itu, temuan penelitian ini juga mendukung kerangka *pro-poor growth* yang dikemukakan oleh Kakwani & Pernia, (2000), yang menekankan bahwa kualitas pertumbuhan lebih penting daripada kuantitas pertumbuhan semata. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai peningkatan kualitas manusia berpotensi memperlebar kesenjangan dan memperlambat penurunan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan oleh Pratamasyari *et al.*, (2025) dalam studi panel provinsi di Indonesia. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,43 menunjukkan bahwa meskipun model memiliki daya jelas yang cukup baik, kemiskinan tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di luar pertumbuhan ekonomi dan IPM, seperti pengangguran, struktur sektor ekonomi, kebijakan sosial, dan faktor geografis. Hal ini sejalan dengan temuan Soleman & Soleman, (2022) dan Didu *et al.*, (2023) yang menegaskan bahwa kemiskinan di Indonesia, khususnya di kawasan timur, bersifat struktural dan multidimensional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum bersifat inklusif dan belum mampu menjangkau kelompok masyarakat miskin secara efektif. Sebaliknya, pembangunan manusia yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki peran yang lebih konsisten dalam menurunkan kemiskinan, menegaskan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam proses pengentasan kemiskinan. Tidak signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan kuatnya peran ketimpangan antarwilayah sebagai faktor peredam yang melemahkan elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan, sehingga peningkatan output ekonomi tidak secara otomatis diikuti oleh perbaikan kesejahteraan di wilayah tertinggal. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan pembangunan manusia, pengurangan ketimpangan regional, dan penciptaan pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2025). Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi. BPS Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi. BPS Indonesia.
- Costello, M., Jenkins, J. C., & Aly, H. (2015). Bread, Justice, or Opportunity? The Determinants of the Arab Awakening Protests. *World Development*, 67, 90–100. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.10.002>
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Didu, S., Chendrawan, T. S., & Ul Jannah, A. N. S. (2023). Analysis of Factors Affecting Poverty in Eastern Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*, 18(2), 159. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i2.23203>
- Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Growth is Good for the Poor. *Journal of Economic Growth*, 7(3), 195–225. <https://doi.org/10.1023/A:1020139631000>
- Dudek, M., Bashynska, I., Filyppova, S., Yermak, S., & Cichoń, D. (2023). Methodology for assessment of inclusive social responsibility of the energy industry enterprises. *Journal of Cleaner Production*, 394, 136317. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136317>
- Edison, E., & Andriansyah, M. (2023). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan di Indonesia. *Journal Development*, 11(2), 134–146. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i2.323>
- Eki Arianto, & Hendry Cahyono. (2025). The Effect Of Human Development Index And Unemployment On Poverty In Indonesia 2018-2023. *Finance : International Journal of Management Finance*, 2(4), 59–64. <https://doi.org/10.62017/finance.v2i4.83>
- Elsani, D., Fitrialis, R., Cahyono, R., Aldiansyah, Y. F., & Fitriana, N. (2024). Analisis Dinamika Perekonomian 3 Sektor dalam Konteks Pertumbuhan Ekonomi Regional. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia*, 3(2), 10–20. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Frisnoiry, S., Putri, I. E., Sari, N. I., & Sinaga, C. R. A. K. (2024). Analisis Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada Tahun 2023. *EKOMA :Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 1360–1367.

- <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/3799>
- Hagen, E. E. (1957). The Process of Economic Development. *Economic Development and Cultural Change*, 5(3), 193–215. <https://doi.org/10.1086/449733>
- Huda, A. C., Az-Zahra, A., Yasmin, F. P., Ningrum, I. W. K., Putra, W. S., & Budiasih, B. (2023). Analisis Regresi Spasial Persentase Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 747–756. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1792>
- Ifa, K. (2025). Dinamika Kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia: Peran Strategis Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 5(2), 193–221. <https://doi.org/10.56013/jebi.v5i2.4348>
- Jati, D., Tj, H. K., & Wijaya, M. (2023). Ketimpangan Antar Wilayah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Majalah Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 20(September), 46–54.
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is Pro-poor Growth? *Asian Development Review*, 18(01), 1–16. <https://doi.org/10.1142/S0116110500000014>
- Mu'minah, S., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Desentralisasi dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 342–351. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1053>
- Pratamasyari, D. A., Riefma, N., & Amalia, R. (2025). *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah The Impact of Human Development Index on Poverty Rates in Indonesia : Panel Data Analysis of 34 Provinces*, 2015-2023. 7(2), 372–388.
- Pratiwi, S. A., Noorsyarifa, G. C., & Apsari, N. C. (2022). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Ekonomi di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39965>
- Rahman, M. S., & Primandhana, W. P. (2025). Analysis of the Influence of Human Development, Economic Growth, and Labor Indices on Poverty Levels in Sumenep Regency. *Journal of Regional Economics and Development*, 3(2), 12. <https://doi.org/10.47134/jred.v3i2.980>
- Ravallion, M. (2001). Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Anis Salsabila, Zahra Ramadhani, Goklas Purba, Muhammad Alif Zuanda4, Asnidar Asnidar, & Ahmad Ridha. (2024). Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 192–208. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3485>
- Shen, Y., & Li, S. (2022). Eliminating poverty through development: The dynamic evolution of multidimensional poverty in rural China. *Economic and Political Studies*, 10(1), 85–104. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2028992>
- Si, S., Ahlstrom, D., Wei, J., & Cullen, J. (Eds.). (2021). *Business, Entrepreneurship and Innovation Toward Poverty Reduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003176107>
- Sihombing, P. R., Sinarwati, N. K. S., & Astawa, I. G. P. B. (2023). Korelasi Antar Variabel Makro Penentu Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 29–44. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.3772>
- Simamora, T. L., Purba, R. W., Erlisa, E., Lita, L., Riana, O., & Pratiwi, A. A. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2019-2024. *ECo-Buss*, 8(2), 2065–2078. <https://doi.org/10.32877/eb.v8i2.3507>
- Soleman, R., & Soleman, R. (2022). Determinants of Poverty Rate in Eastern Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 7(2), 261–275. <https://doi.org/10.20473/jiet.v7i2.39392>

- Suhada, W., Damayanti Rusmana, F., Al-Muhajirin Purwakarta, S., & Al-Amar Subang, S. (2025). Addressing Development Disparities Between Western and Eastern Indonesia: Economic Challenges and Solutions. *Sinomika Journal | Volume*, 3(5), 343–354. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v3i5.2473>
- Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Syafitri, L. D., Putri, S. S., Manumpil, P., Ambarwati, N. H., & Romarina, A. (2025). Mewujudkan Pertumbuhan Yang Merata: Analisis Literatur Ekonomi Pembangunan Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2615–2620. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3839>
- Tondi, L., & Boni, Y. (2025). Kualitas Pembangunan Manusia dan Pengeluaran Rumah Tangga terhadap Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Indonesia: Pendekatan Data Panel. *Jurnal Ekomomi Pembangunan*, 15(1), 1207–1214.
- United Nations Development Programme. (2024). REPORT 2023 / 2024 Reimagining cooperation in a polarized world. In *European Union (EU). (2024). EU Missions and Operation*.
- Venosia, D., Toha Saifudin, & Nur Chamidah. (2025). The Modeling of The Poverty Rate In Indonesia From 2018 to 2023 Using A Panel Data Regression Approach. *J Statistika: Jurnal Ilmiah Teori Dan Aplikasi Statistika*, 18(1), 798–807. <https://doi.org/10.36456/jstat.vol18.no1.a10139>
- Wooldridge, J. M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. *Booksgooglecom*, 58(2), 752. <https://doi.org/10.1515/humr.2003.021>
- Wulansari, S., Nazarina, E., & Huda, A. M. (2025). Pengaruh Indeks Pendidikan, Tingkat Kemiskinan, dan Inflasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 6812–6823. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.4632>
- Yudi Pardita, D. P., Darma, I. K., Putra, I. K., & Sri Purnami, A. A. (2024). Human Development and Poverty in Indonesia. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 07(08). <https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i8-08>